



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MARTHA OCTAVIA**
2. Jabatan : **KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN AUDIT**
3. NHK : **32033**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>709.855.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 709.855.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>673.650.000</b>
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 380.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 33.750.000		
5. LAINNYA, SEPEDA LIPAT FNHON GUST Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
6. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 51.900.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>238.949.486</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>42.220.394</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>403.503.662</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.000.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.159.178.542</b>



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.159.178.542

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.